

Studi Kompetensi Multikulturalisme pada Dosen UIN Jakarta dan UIN Riau

The Study of Competence Multiculturalisme on Lecturers of UIN Jakarta and UIN Riau

Imam Hanafi¹, Imran Rosidi², Zulkifli M. Nuh³, Alimuddin Hassan⁴ Maulana,⁵

^{1,2,3,4}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

⁵UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

^{1,2,3,4}Jl. H. R. Soebrantas KM. 15 Simpang Panam Pekanbaru, Riau

⁵Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: imam.hanafi@uin-suska.ac.id¹, imronrosidi@gmail.com²,

zulkiflimnuh@gmail.com,³ alimuddin@uin-suska.ac.id,⁴ maulana@uinjkt.ac.id⁵

Abstrak: Sejak awal abad 21, multikulturalisme menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Munculnya isu ini tak lepas dari sejumlah peristiwa kekerasan sosial yang berbasis etnis, suku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan PTKI dalam menyikapi isu ini, dengan melihat kemampuan para pendidikannya dalam memahami multikulturalisme tersebut. Sejak IAIN berubah menjadi UIN, maka beberapa dosen yang berlatarbelakang umum (sain) ikut mewarnai kajian Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di UIN Riau dan UIN Jakarta dengan sampel 182 dosen, yang memiliki latarbelakang umum dan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama. Tingkat kesadaran multikulturalisme di kalangan dosen UIN Riau dan Jakarta cukup baik, sudah mendekati skor ideal yaitu 275. Kedua, Terdapat perbedaan tingkat pemahaman multikulturalisme antara dosen UIN Riau dengan dosen UIN Jakarta, baik yang berlatarbelakang umum maupun agama. Ketiga, Terdapat perbedaan kemampuan multikulturalisme di kalangan dosen umum dengan dosen agama, Keempat, Tidak ada korelasi antara tingkat pengetahuan dan ketrampilan multikultural yang dimiliki oleh dosen dengan kesadaran multikultural yang mereka miliki.

Kata Kunci: multikultural, studi Islam, kompetensi, dosen

Abstract: Since the early of the 21st century, multiculturalism has become a crucial issue in educational field in Indonesia. This cannot be separated from the rise of social violence's related to ethnic, religion, race and social group. Therefore, it is crucial to know how is the ability of the PTKI (Islamic Higher Educations in Indonesia) responding this issue by looking at their lecturers understanding about multiculturalism. Since the change of IAIN to UIN, some lecturers from science educational background have participated in Islamic studies in Indonesia. This research was done at UIN Riau and UIN Jakarta. The samples are 182 lecturers from both religious and non-religious (science) educational background. This research finds that; First, the level of multicultural consciousness or understanding among lecturers at UIN Riau and UIN Jakarta is relatively good, almost approaching the ideal score, i.e 275. Second, there is different multicultural understanding level between

lecturers at UIN Riau and UIN Jakarta, both from religious and non-religious educational background. Third, there is different multicultural ability between religious-based lecturers and non-religious (science or secular) lecturers. Fourth, there is no correlation between multicultural knowledge and skill owned by lecturers and multicultural consciousness they own.

Keywords: Multicultural, Islamic Studies, Competence, Lecturer

Pendahuluan

Arus globalisasi yang sedang berlangsung saat ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh umat Islam dan seluruh penduduk bumi ini. Oleh karena itu, globalisasi perlu disadari dan dipahami serta direspon secara tepat dan arif. Hal ini karena globalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat dunia.¹ Dalam proses ini, semua warga bangsa dunia bertemu untuk saling menerima tradisi, kultur, agama dan nilai-nilai. Hal ini, menurut Nurcholish Madjid, telah mendorong kita berada pada *global village* (desa buana). Sebuah kondisi dimana dunia menjadi sangat transparan, dunia seolah berada pada satu “desa”, tanpa batas administrasi suatu negara. Akibatnya, kontak-kontak budaya semakin cepat dan pergesekan kultur serta tradisi serta agama menjadi tidak terhindarkan, yang bahkan tidak lagi mengenal batas-batas geografis secara konvensional. Internet, e-mail, faksimile, telepon, mobile phone, video dan sebagainya menjadikan kita dapat memperoleh pengetahuan lebih cepat.²

Agama sebagai salah satu bagian dari identitas primordial seseorang,³ juga tidak terlepas dari tekanan-tekanan dari arus globalisasi. Salah satu bagian penting dari konsekuensi tata kehidupan global saat ini adalah adanya kemampuan untuk memiliki kesadaran bahwa kita berada ditengah-tengah pluralitas etnis, budaya, bahkan agama. Sehingga kita mampu membangun dan menumbuhkan kembali teologi yang berbasis pada pluralitas dalam masyarakat.

Namun demikian, diantara efek dari globalisasi ini menurut Johan Meuleman, justru telah melahirkan sikap beragama yang kaku, rigid dan intoleran.⁴ Kelompok keagamaan baru ini, sering disebut dengan istilah Islam fundamentalis.⁵ Gerakan keagamaan fundamentalisme-radikal Islam yang cukup menonjol di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini, tentu merubah wajah studi Islam di Indonesia, terutama sekali ketika kelompok-kelompok keagamaan tersebut kemudian menebar teror pada saat melakukan aksinya secara sporadis.⁶

Sebagaimana diketahui, di era multikultural dewasa ini Kementerian Agama telah memiliki PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) berbentuk UIN,⁷ dengan jumlah yang cukup banyak, dengan berbagai fakultas dan program studi yang ditawarkannya, mulai dari fakultas dan prodi keislaman hingga fakultas dan prodi non-keislaman. Konsekuensi dari dibukanya fakultas dan prodi dengan nomenklatur umum tersebut, adalah masuknya beberapa orang dosen dengan kualifikasi pendidikan umum.

Kondisi ini, dikhawatirkan akan adanya semangat untuk kembali “ajaran Islam” di kalangan program studi Umum.⁸ Misalnya pada Fakultas Sains dan Teknologi.⁹ Kecendrungan ini semakin menguatkan tantangan multikulturalisme. Sehingga UIN, sebagai lembaga pendidikan, harus menjadi model yang mampu mengajarkan dan menanamkan ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat manusia tanpa memandang agama, ekonomi, etnis, budaya, bahasa, dan lainnya. Berbagai kasus kekerasan berbasis sara, dengan melibatkan mahasiswa di UIN,¹⁰ menjadi bukti sahih tentang perlunya pengembangan kesadaran multikultural yang bukan hanya mampu mendorong setiap orang mengakui pelbagai keragaman suku, etnis, ras, agama, dan budaya; tetapi juga mampu menginisiasi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran multikultural. Melalui pendidikan multikultural, lembaga dan komunitas pendidikan dapat memerankan dirinya sebagai agen penyadaran multikultural yang inklusif, dan terbebas dari segala kebijakan diskriminatif, tindak kekerasan, bias kultural-agama-etnis, dan berbagai stereotipe.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan atau kompetensi para dosen di UIN dalam memahami multikulturalisme. Para dosen dibedakan bidang keahlian, yaitu yang memiliki latarbelakang disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum. Kemudian, UIN dipilih hanya UIN Riau dan UIN Jakarta.

Penelitian ini, melibatkan 200 orang partisipan, yang terdiri dari; *Pertama*, 100 orang dari UIN Riau dengan rincian 50 orang dosen yang berlatarbelakang disiplin keilmuan agama dan 50 orang dosen yang memiliki latarbelakang disiplin keilmuan umum. Dalam praktik di lapangan, diperoleh jumlah responden sebanyak 47 dosen umum, dan 46 dosen agama; *Kedua*, 100 orang dari UIN Jakarta, dengan rincian 50 orang dosen yang berlatarbelakang disiplin keilmuan agama dan 50 orang dosen yang memiliki latarbelakang disiplin keilmuan umum. Namun, dalam pelaksanaannya,

dari 50 orang dosen yang bersedia mengisi instrumen hanya 44 orang dosen agama dan 45 orang dosen umum.

Sedangkan instrumen pengukurannya adalah kemampuan memahami multikultural yang memiliki tiga dimensi, yaitu kesadaran multikultural, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi kesadaran multikultural memuat 55 item skor; 20 item untuk dimensi pengetahuan; dan 15 item skor untuk dimensi keterampilan. Dengan demikian, total item skornya adalah 85. Pengukuran dimensi kesadaran multikultural menggunakan skala beda-semantik dengan 5 alternatif pilihan. Sementara untuk dimensi pengetahuan dan keterampilan menggunakan skala Likert juga dengan 5 pilihan.

Membingkai Studi Islam dalam Konteks Multikulturalisme

Studi Islam sejatinya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kualitas intelektual kaum Muslim itu sendiri. Studi Islam dalam maknanya yang paling luas adalah masalah intelektual. Studi Islam yang mengabaikan dimensi intelektual akan melahirkan kemandulan dan kebangkrutan intelektualisme di kalangan Muslim.¹¹ Oleh karena itu, menurut Syafii Maarif, untuk dapat mencapai peningkatan kualitas profesi, seorang Muslim yang melakukan studi Islam harus dapat mendalami bidang spesialisasinya dan disiplin-disiplin terkait. Akan tetapi, untuk dapat mengembangkan visi intelektual, seorang ilmuwan Muslim harus menerobos batas-batas disiplin yang digelutinya. Dia harus dapat menggumuli agama, filsafat, sejarah, sastra dan wacana-wacana intelektual lainnya. Tanpa bantuan komponen ilmu-ilmu ini, visi intelektual studi Islam akan terpasung oleh spesialisasi bidang yang digelutinya.¹²

Kemampuan intelektual Muslim untuk “menerobos” batas-batas disiplin yang digelutinya di era multikultural dewasa ini adalah sebuah keniscayaan, agar tidak mengalami kemandulan dan kebangkrutan intelektual, sebagaimana disinyalir Syafii Maarif di atas. Namun, lagi-lagi penulis ingin menguatkan bahwa kemampuan “menerobos” batas ini secara etis harus juga berpijak pada landasan *core* keilmuannya. Fazlur Rahman pernah mengingatkan bahwa studi Islam itu harus tetap *Qur'an oriented*,¹³ artinya segala permasalahan yang ada harus dipelajari dan ditimbang dulu berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah posisi penggunaan paradigma “teosentrisme”. Setelah permasalahan itu diberi

landasan moral yang solid, barulah kemudian dicarikan kerangka penyelesaiannya dengan telaah yang berdasar pada paradigma “antroposentrisme”. Hal ini perlu dilakukan, mengingat “Islam yang tidak dapat memecahkan problem-problem kemanusiaan hanya akan menjadi ancaman di masa depan”,¹⁴ demikian tulis Rahman. Dengan demikian, masalah-masalah kemanusiaan itu diselesaikan dengan paradigma “teo-antroposentrisme”.

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim besar di dunia. Menurut hasil survey pada tahun 2000 mencatat bahwa jumlah umat Islam di negeri ini berada pada angka 88,22%, sebuah prosentasi yang tinggi sekali.¹⁵ Di lain sisi, Indonesia juga dikenal sebagai Negara dengan keanekaragaman masyarakatnya. Ada sekitar 656 kelompok etnis, besar dan kecil hidup di wilayah Indonesia, memiliki budaya, tradisi, agama dan adat istiadat yang berbeda-beda, berbicara dalam 746 bahasa dan dialek lokal yang berbeda. Maknanya adalah Indonesia merupakan bangsa yang maha-majemuk, hidup bermacam agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial yang dimiliki. Dengan demikian, maka kemajemukan merupakan realitas yang tak terbantahkan di bumi Nusantara ini.

Bercermin dari kenyataan yang ada tersebut, maka kesadaran multikultural menjadi sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam menyikapi realitas tersebut. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme juga mendasarkan diri pada pengakuan terhadap minoritas. Multikulturalisme berdiri dalam ketegangan antara hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan interpretasi atas hak-hak bangsa atas perkembangan dirinya.¹⁶ Dengan kata lain, multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda; penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan.¹⁷

Nah dalam konteks kajian studi Islam di Perguruan Tinggi Islam, maka menjadi sangat penting untuk melibatkan pengembangan aspek kemanusiaan, yaitu nilai-nilai objektif yang tidak dibatasi oleh kultur tertentu, nilai kebebasan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Persamaan hak adalah nilai-nilai kemanusiaan yang di bangun di atas fondasi demokrasi,¹⁸ menjadi penting untuk dikembangkan dalam studi Islam di Perguruan Tinggi. Sebab, antara pendidikan demokratis dan pendidikan pluralis-

multikultural merupakan sebuah rangkaian. Masing-masing saling bergantung dan saling mempengaruhi.¹⁹ Oleh karena itu membangun pendidikan yang berparadigma pluralis-multikultural merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

Studi Islam di perguruan tinggi selama ini, masih bersifat *particular pattern*, sebagaimana studi Islam pada abad pertengahan, sebuah model pembelajaran yang lebih didominasi oleh corak dogmatis, partikular, dan tidak selaras dengan dinamika dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, selalu saja terbuka ruang yang tidak mampu dijelajahi oleh studi Islam dengan pola *particular pattern*. Implikasinya, studi Islam belum diakui oleh para ahli sejarah agama-agama dalam studi agama. Lebih jauh, Islam kemudian dipandang tidak secara objektif. Bahkan Islam kemudian diidentikkan dan dipahami hanya dari segi sakralitas semata-mata.²⁰ Kajian Islam pada masa ini, lebih menitikberatkan pada kajian Tradisi Tinggi, yaitu kajian yang menitikberatkan pada landasan normativitas, wahyu, konsepsi pemikiran, dan ortodoksi keagamaan yang bersifat eksklusif.

Kondisi studi Islam tersebut, banyak dikritik oleh Harun Nasution. Menurut beliau, pola studi Islam semacam ini tidak lagi memiliki makna yang signifikan. Hal ini disebabkan karena studi Islam *particular pattern* tidak mampu memberikan deskripsi secara memadai terhadap fenomena keagamaan secara lebih utuh.²¹ Sebab, ajaran Islam tidak hanya terdiri dari aspek sakralitas saja, tetapi juga terdapat dimensi profanitas. Dalam studi Islam dengan pola *particular pattern*, dimensi ini kurang memperoleh perhatian secara memadai, atau bahkan ditinggalkan.²²

Pelan-pelan, pasca Harun Nasution, studi Islam mengalami perkembangan dengan berupaya melakukan respon konstruktif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian maju. Sehingga, dalam perkembangannya, kajian studi Islam berkembang dengan menitikberatkan pada kajian dalam bentuk historisitas, pluralisme, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Tradisi Rendah memperluas wilayah studi Islam, sehingga mencakup kawasan Islam di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Islam di Bekas Uni Sovyet, Islam di Barat, dan Islam di Asia Tenggara.²³

Sejalan dengan formulasi ini, maka dibutuhkan sebuah kerangka metodologi yang tepat dan aplikatif. Dalam kerangka untuk memahami wilayah kajian ini, sebagaimana ditegaskan oleh M. Amin Abdullah, bahwa studi Islam bekerja dengan data yang mengandung makna-makna keagamaan dalam masyarakat atau komunitas, kelompok, atau individu Muslim. Karena itu, masyarakat Muslim dan oleh para

sarjana Muslim sangat membutuhkan bantuan metodologis dari sudut pandang *Religionswissenschaft* yang mengharuskan para pengkaji untuk memperhatikan secara penuh apa yang dimaksud dengan “beragama” dan “agama”. Bantuan metodologis dari sudut pandang studi agama juga diperlukan untuk melihat makna keagamaan tertentu dari data yang menjadi *concern* Muslim dan kemudian menentukan bagaimana data tersebut diorganisir ke dalam suatu perangkat struktur dan sistem yang koheren. Tidak cukup berhenti sampai di situ, usaha itu perlu dilanjutkan dengan menyusunnya kembali menjadi pola keagamaan yang bersifat umum, yang berlaku bagi setiap pemeluk agama-agama yang hidup sekarang ini.

Ia juga membutuhkan bantuan metodologis dalam berbagai studi tentang data keagamaan untuk dapat memahami bahwa semua agama yang memiliki kendaraan historis-empiris yang khusus (*particular*) dapat memiliki elemen makna keagamaan yang sama, yang dipahami secara transendental-universal. Data-data keagamaan yang bersifat normatif-teologis ini pada saat yang sama mempunyai muatan historis, sosial, budaya, dan politik. Jadi, dalam bentuknya yang historis-empiris, agama selalu menjadi bagian dari setting historis dan sosial dari komunitasnya, namun pada saat yang sama secara fenomenologis ia mempunyai pola umum (*general pattern*) yang dapat dipahami secara intuitif dan intelektual sekaligus oleh umat manusia di manapun mereka berada.

“Pergumulan antara keduanya yang tak kunjung selesai kapan pun, yakni antara aspek historis-empiris-partikular dari agama-agama dan aspek meaning (makna) keberagamaan umat manusia yang mendasar dan universal-transendental, pada gilirannya ingin dijembatani dan dikawinkan oleh pendekatan fenomenologi agama (*phenomenology of religion*)”.²⁴

Dari kutipan di atas terlihat adanya sebuah kemungkinan dan peluang untuk melakukan perluasan dan pemekaran wilayah research program dalam rangka untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman, paling tidak pada kawasan “Islam historis”. “Islam historis” yang berada dalam domain “protective belt”—meminjam istilah Imre Lakatos dalam M. Amin Abdullah yang menyatakan bahwa “Islam historis” merupakan fokus yang nyata dan wilayah konkret untuk program rekonstruksi dan reformulasi ilmu-ilmu keislaman pada era modern ini. Hal itu akan berhasil bila dilakukan transplantansi metodologi, teori, dan tradisi riset

yang telah dengan sangat teliti dibangun oleh para ilmuwan yang bergerak di bidang humaniora, sosial, dan studi agama.²⁵

Multikulturalisme; Sebuah Konsep Awal

Secara sederhana multikultural berarti “keberagaman budaya”.²⁶ Sebenarnya, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut –baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda- yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multicultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya ‘ketidaktunggalan’. Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikultural. menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*)²⁷ terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.

Diversitas dalam masyarakat modern bisa berupa banyak hal, termasuk perbedaan yang secara alamiah diterima oleh individu maupun kelompok dan yang dikonstruksikan secara bersama dan menjadi semacam *common sense*. Perbedaan tersebut menurut Bikhu Parekh bisa dikategorikan dalam tiga hal - salah satu atau lebih dari tiga hal-, yaitu *pertama* perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan

kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku.

Kedua, perbedaan dalam perpektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perpektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).²⁸

Sebagai sebuah gerakan, menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Setelah itu, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Setelah tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting yaitu, *pertama* multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini. Gelombang *kedua*, adalah multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, yang mengalami beberapa tahapan, diantaranya:²⁹ kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli/masyarakat adapt (*indigeneous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post-nasionalisme, post-modernisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat³⁰ Multikulturalisme gelombang kedua ini, menurut Steve Fuller pada gilirannya memunculkan tiga tantangan yang harus diperhatikan sekaligus harus diwaspadai, yaitu, *pertama* adanya hegemoni barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ilmu pengetahuan. Komunitas, utamanya negara-negara berkembang, perlu mempelajari sebab-sebab dari hegemoni barat dalam bidang-bidang tersebut dan mengambil langkahlangkah seperlunya mengatasinya, sehingga dapat sejajar dengan dunia barat³¹ *Kedua*, esensialisasi budaya. Dalam hal ini multikulturalisme berupaya mencari esensi budaya tanpa harus jatuh ke dalam pandangan yang *xenophobia* dan etnosentrisme.

Multikulturalisme dapat melahirkan tribalisme yang sempit yang pada akhirnya merugikan komunitas itu sendiri di dalam era globalisasi. *Ketiga*, proses globalisasi, bahwa globalisasi bisa memberangus identitas dan kepribadian suatu budaya.³² Oleh

karena itu, untuk menghindari kekeliruan dalam diskursus tentang multikulturalisme, Bikhu Parekh menggarisbawahi tiga asumsi mendasar yang harus diperhatikan dalam kajian ini, yaitu *pertama*, pada dasarnya manusia akan terikat dengan struktur dan sistem budayanya sendiri dimana dia hidup dan berinteraksi. Keterikatan ini tidak berarti bahwa manusia tidak bisa bersikap kritis terhadap sistem budaya tersebut, akan tetapi mereka dibentuk oleh budayanya dan akan selalu melihat segala sesuatu berdasarkan budayanya tersebut. *Kedua*, perbedaan budaya merupakan representasi dari sistem nilai dan cara pandang tentang kebaikan yang berbeda pula. Oleh karena itu, suatu budaya merupakan satu entitas yang relatif sekaligus partial dan memerlukan budaya lain untuk memahaminya. Sehingga, tidak satu budaya-pun yang berhak memaksakan budayanya kepada sistem budaya lain.³³

Ketiga, pada dasarnya, budaya secara internal merupakan entitas yang plural yang merefleksikan interaksi antar perbedaan tradisi dan untaian cara pandang. Hal ini tidak berarti menegasikan koherensi dan identitas budaya, akan tetapi budaya pada dasarnya adalah sesuatu yang majemuk, terus berproses dan terbuka.³⁴

Oleh karena itu, tepat kiranya jika Parekh menulis: *"a culture's relation to itself shapes and is turn shaped by its relation to others, and their internal and external pluralities presuppose and reinforce each other. A culture cannot appreciate the value of other unless it appreciates the plurality within it"*.³⁵

Adapun multikulturalisme yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah tingkatan di mana seseorang secara aktif terlibat dalam proses kesadaran diri, pemerolehan pengetahuan dan implementasi keterampilan dalam bekerja dengan individu-individu yang berbeda. Sementara instrumennya dikembangkan oleh Husni Thoyyar.³⁶

Kesadaran Multikultular yang kian Meredup

Saat ini, kita akan semakin sulit menemukan sebuah bangsa yang memiliki budaya tunggal atau homogen. Dalam relasi apapun dalam masyarakat atau komunitas kita, pasti akan menemukan fenomena itu. Lebih-lebih pada dunia pendidikan, yang akan berinteraksi dengan berbagai ragam latarbelakang peserta didik, sangat memungkinkan terjadinya multikulturalisme budaya, kecerdasan, bahasa, bahkan agama.

Jika dulu studi Islam masih berada pada satu lembaga khusus, seperti Institute Agama Islam, maka saat ini, sudah berubah menjadi Universitas. Perubahan ini, semakin

menuntut adanya universalitas dalam studi Islam. Selain itu juga peserta didik atau mahasiswa juga akan semakin heterogen, bahkan akan ada mahasiswa selain muslim yang akan belajar di Universitas Islam.

Dengan demikian, gagasan tentang multikulturalisme menjadi sangat penting untuk diperbincangkan di tengah-tengah perkembangan kehidupan sosial – politik dan budaya di Indonesia yang terus meluas memasuki ruang publik bahkan domestik. Perluasan gagasan tersebut seiring dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap praktik demokrasi dan ide masyarakat madani sejak beberapa dekade terakhir. Wacana pluralisme, toleransi, inklusivisme dan gagasan multikulturalisme pun mulai menarik perhatian para intelektual dan perluasan ragam pemikiran kritis termasuk di kalangan pakar pendidikan.

Namun demikian, berdasarkan penelitian ini, menunjukkan hasil yang sangat berbeda dengan kondisi seharusnya tersebut di atas. Dalam aspek ini, beberapa pernyataan yang disampaikan adalah kesadaran tentang orang yang berbeda suku/etnis atau penganut agama lain pindah dan tinggal di dekat rumahnya, orang dari ras lain atau penganut agama lain yang bermaksud mencalonkan diri menjadi calon pimpinan kepala daerah/kota di daerahnya, ada kelompok agama yang oleh pemegang otoritas (pemerintah/organisasi agama) dinyatakan sesat, tetapi kelompok itu melakukan aktivitas keagamaan di tempat ibadah mereka sendiri, ada umat beragama lain yang akan mendirikan tempat ibadah, situasi dimana orang berada dalam suatu ruang pertemuan/aula yang di dalamnya sebagian besar adalah orang-orang yang berasal dari ras atau agama lain yang berbeda dengannya, berjalan seorang diri di malam hari dan berpapasan dengan sekumpulan orang yang berasal dari ras atau agama lain yang berbeda dengannya, ada saudara yang memiliki hubungan asmara dengan ras atau penganut agama lain dan mereka berencana untuk melanjutkan ke jenjang pertunangan dan pernikahan, adanya orang dari ras atau penganut agama lain mengajak untuk berteman dengannya di media sosial *online*, dan tempat atau lembaganya bekerja kedatangan pimpinan atau tenaga kerja baru yang berasal dari ras atau penganut agama lain.

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Rata-Rata (Mean), Standar Deviasi (Standard Deviation), dan Selisih Skor Minimum-Maksimum (Range) Kesadaran Multikultural.³⁷

Kategori	N	M	SD	Range
Dosen Umum UIN Jakarta	45	192.84	36.937	142 – 270
Dosen Umum UIN Riau	47	153.40	32.901	88 – 213
Dosen Agama UIN Jakarta	44	209.84	36.843	140 – 270
Dosen Agama UIN Riau	46	197.46	33.792	139 – 258

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kesadaran multicultural yang dimiliki oleh dosen UIN Jakarta lebih tinggi di banding UIN Riau, baik pada dosen yang berlatarbelakang agama maupun berlatar belakang umum.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Rata-Rata (Mean), Standar Deviasi (Standard Deviation), dan Selisih Skor Minimum-Maksimum (Range) Pengetahuan Multikultural

Kategori	N	M	SD	Range
Dosen Umum UIN Jakarta	45	55.96	9.065	41 – 79
Dosen Umum UIN Riau	47	53.94	5.318	44 – 68
Dosen Agama UIN Jakarta	44	62.64	10.040	40 – 80
Dosen Agama UIN Riau	46	49.50	5.947	35 – 63

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pengetahuan multicultural yang dimiliki oleh dosen UIN Jakarta juga masih jauh lebih tinggi di banding para dosen di UIN Riau, baik pada dosen yang berlatarbelakang agama maupun berlatar belakang umum.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Rata-Rata (Mean), Standar Deviasi (Standard Deviation), dan Selisih Skor Minimum-Maksimum (Range) Ketrampilan Multikultural

Kategori	N	M	SD	Range
Dosen Umum UIN Jakarta	45	51.00	7.654	28 – 70
Dosen Umum UIN Riau	47	50.49	8.574	34 – 70
Dosen Agama UIN Jakarta	44	54.09	10.161	35 – 70
Dosen Agama UIN Riau	46	47.52	9.910	23 – 71

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pengetahuan multicultural yang dimiliki oleh dosen UIN Jakarta juga masih jauh lebih tinggi di banding para dosen di UIN Riau, baik pada dosen yang berlatarbelakang agama maupun berlatar belakang umum. Meskipun pada ketrampilan dosen umum dari UIN Riau dan UIN Jakarta hampir memiliki tingkat kesamaan, hanya selisih sedikit.

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran tentang multikulturalisme di kalangan dosen sudah menunjukkan tingkat yang baik. Jika merujuk pada perolehan rata-rata nilai, sudah hampir mendekati nilai maksimal, yaitu 275. Hal ini tentu cukup menggembirakan bagi perkembangan studi Islam di Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat skor yang cukup memprihatinkan di tunjukkan oleh responden dosen dari UIN Riau yang berlatarbelakang umum, yaitu jauh dibawah skor rata-rata, yaitu 88. Meskipun prosentasenya hanya 2.1%, akan tetapi jika diakumulatiskan skor mereka yang dibawah rata-rata, yaitu 135 kebawah, jumlahnya cukup memprihatinkan, yaitu 34.04%. Hal ini, tentu menjadi catatan penting bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan lebih luas orientasi studi Islam yang lebih baik lagi.

Namun demikian, jika dilihat pada sebaran data tentang tingkat kesadaran multikultural ini, sebenarnya tidaklah terlalu berbeda jauh dengan UIN Jakarta. Misalnya sebaran data pada UIN Jakarta yang berlatar belakang umum, banyak yang berada pada range 142 - 180, begitu pula pada dosen yang UIN Riau yang berlatarbelakang umum, banyak berada pada range itu. Rendahnya kesadaran multikulturalisme di UIN Jakarta dipengaruhi oleh isu pilkada Jakarta yang melibatkan sentiment etnis dan agama.³⁸

Kemudian pada level pengetahuan dan ketrampilan multikultural, justru yang rendah berada pada dosen UIN Riau yang berlatarbelakang agama. Hal ini tentu menjadi tugas bersama untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan multikultural mereka yang cenderung rendah tidak berkorelasi dengan kesadaran multikultural mereka.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran multikulturalisme di kalangan dosen UIN Riau dan Jakarta cukup baik, sudah mendekati skor ideal yaitu 275. Namun demikian terdapat perbedaan tingkat pemahaman multikulturalisme antara dosen UIN Riau dengan dosen UIN Jakarta, baik yang berlatarbelakang umum maupun agama. Yang lebih memprihatinkan adalah tingginya perbedaan kemampuan multikulturalisme di kalangan dosen umum dengan dosen agama;

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi para peneliti selanjutnya untuk melihat faktor-faktor lain, yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal ini juga

menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan multikultural mereka yang cenderung rendah tidak berkorelasi dengan kesadaran multikultural mereka. **Wallahu a'lam bi showab**

Catatan:

- ¹ Diantara fenomena menarik dengan fenomena globalisasi adalah cepatnya arus teknologi informasi. Salah satu buku menarik yang berkaitan dengan percepatan arus informasi secara ekstrim dalam arus globalisasi, bisa merujuk kepada Marshall McLuhans dan Anthony Giddens. Lihat Bruce Russell dan Harvey Harr, *World Politics, the Menu for Choice*, (New York : W.H. Freeman & Company, 1985), Anthony Giddens, *Runaway World : Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- ² Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multi Religius* (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 4
- ³ Secara sosiologis, kontruksi agama dalam masyarakat adalah bagian penting dari sebuah identitas personal. Selain agama merupakan kebutuhan rohani bagi setiap manusia secara individual. Bahkan ia juga ia menjadi simbol keanggotaan dalam sebuah organisasi keagamaan. Baca Chen, C. "The Religious Varieties of Ethnic Presence: A Comparison Between a Taiwanese Immigrant Buddhist Temple and an Evangelical Christian Church", dalam *Jurnal Sociology of Religion*, Vol. 63 (2), 2000, hlm. 215-238. Lihat juga Hurh, W. M. and K. C. Kim. "Religious Participation of Korean Immigrants in the United States" dalam *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 2, 1990, hlm. 19-34
- ⁴ Johan Meuleman membagi bentuk respon umat Islam untuk merespon perkembangan globalisasi dan modernisme ke dalam tiga hal, yaitu sikap pelarian ke dalam, pelarian ke luar dan keterbukaan kritis. Lihat Johan Meuleman, "Sikap Islam Terhadap Perkembangan Kontemporer", dalam Mukti Ali,dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998),
- ⁵ Pasca kejatuhan Soeharto, banyak kelompok keagamaan yang pada mulanya bergerak di bawah tanah (*underground*), atau setidaknya berkembang di kalangan terbatas, pada saat kejatuhan rezim Orde Baru muncul secara lebih terbuka untuk memperkuat basis massa dan memperluas jaringannya. Salah satu kelompok keagamaan yang memanfaatkan kejatuhan rezim Orde Baru adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI sebenarnya bukan kelompok keagamaan lokal (*home grown*), tetapi merupakan bagian dari jejaring Hizbut Tahrir (HT) yang telah berkembang melintas batas-batas negara sehingga dikatakan sebagai gerakan Islam transnasional. Lihat Norhaidi Hasan, "Transnational Islam in Indonesia", dalam Peter Mandaville et al., *Transnational Islam in South and Southeast Asia: Movements, Networks, and Conflict Dynamics* (Washington: The National Bureau of Asian Research, 2005), 121-140
- ⁶ Fenomena terorisme di Indonesia bukan bahan baru di Indonesia, insiden maha dahsyat Bom Bali I yang menewaskan ratusan orang tidak berdosa merupakan contoh Indonesia sering disebut sebagai "Sarang teroris", namun pada sisi yang lain kejadian ini ikut serta mempopulerkan JI (Jaringan Islamiyah) sebagai gerbong yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Kata jamaah islamiyah diambil dari bahasa arab yaitu, Jama'ah Islamiyyah yang berarti kumpulan islam (*Islamic organisation*). Pencakotan JI yang di motori oleh Abdullah sungkar dan abu bakar ba'asyir kiranya tidak berlebihan, karena dari sekian pelaku kekerasan Bom Bali adalah alumni pondok pesantren Pondok Ngruki (Pesantren al-Mukmin) yang di pimpin abu bakar ba'asyir.(Lebih jelas baca: Jurnal Usuluddin, Bil 21 [2005] 39-62 hlm. 42
- ⁷ Hingga akhir 2005 sebanyak 6 PTAIN yang telah berhasil melakukan transformasi dari IAIN dan STAIN menjadi UIN, yakni: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (20 Mei 2002), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (21 Juni 2004), UIN Maliki Malang (21 Juni 2004), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (10 Oktober 2005), UIN Syarif Kasim Pekanbaru (2005), dan UIN Alauddin Makasar (2005). Setelah hampir 10 tahun, selama kepemimpinan Meteri Agama Maftuh Basuni, proses perubahan IAIN ke UIN mengalami 'kemandegan'. Barulah dipenghujung tahun 2014, tiga IAIN diresmikan menjadi UIN, yaitu UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Aceh, dan UIN Medan Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2017 ini, telah diresmikan 6 IAIN lagi menjadi UIN, yaitu UIN Jambi, UIN Padang, UIN Lampung, UIN Banten, UIN Mataram, dan UIN Banjarmasin.
- ⁸ Jargon yang sering dikembangkan dalam hal ini adalah "kembali kepada Alquran dan Sunnah". Kelompok ini, kemudian mencoba melakukan "hijrah" dengan menekankan formalisasi syariah atau formalisasi beragama. Lihat Bustomi Ibrohim, "Memaknai Momentum Hijrah", dalam *Jurnal Studia Didkatika*, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 10 No. 2 tahun 2016, hlm. 65. Selain isu itu, mereka juga

- menginginkan penegakan khilafah Islam. Lihat buku Haedar Nasr, *Islam Syariat*, (Bandung: Mizan, 2013)
- ⁹ Beberapa riset menunjukkan bahwa potensi tumbuhnya kelompok-kelompok radikal biasanya di fakultas-fakultas eksakta. Tahun 80-an terjadi peningkatan aktifitas keagamaan di kampus-kampus umum seperti di UGM, UI, Unair, Unhas. Kampus-kampus ini potensial berkembang aktifitas gerakan Islam radikal, jadi justru bukan di kampus-kampus Islam. Lihat misalnya pernyataan Syarifuddin Jurdi, dalam seminar “Radikalisme Kawan Kita”. <http://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/398/page/fakultas> diakses hari Senin 27 Maret 2017. Nah, pasca peralihan IAIN ke UIN, program-program studi Umum semakin merebak di UIN. Bahkan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta, mengalami kerentanan terhadap radikalisme. Riset CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerentanan radikalisme di kalangan mahasiswa Sains dan Teknologi mencapai 22,2%. Sebagaimana yang dikutip oleh **Susanto**, “Bahan Belajar Mandiri Sebagai Suatu Model Modul Studi Islam Berwawasan Deradikalisasi Pemahaman Agama” dalam *Jurnal PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan* - Vol. 30 No. 2 Oktober 2016.
- ¹⁰ A. Ghafur, *Jejak radikalisme pemahaman agama di perguruan tinggi*. (Ciputat: Cendekia Press, 2014), hlm. 1.
- ¹¹ A. Syafii Maarif, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 34
- ¹² *Ibid.*, hlm. 37.
- ¹³ Dikutip dari A. Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Mizan 1993), hlm. 135
- ¹⁴ *Ibid.*, hlm. 140
- ¹⁵ The Wahid Institute, *Prolog Ilusi Negara Islam*, KH. Abdurrahman Wahid (Ed), (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 7
- ¹⁶ Willy Kimlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 1
- ¹⁷ Edi Suharto, “Konflik Etnik dan Naluri Nativistik: Potensi dan Hambatan Pengembangan Masyarakat Multikultural”, Makalah tidak diterbitkan
- ¹⁸ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 26-27
- ¹⁹ Ngainun Naim dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2008), hlm. 73
- ²⁰ M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 6.
- ²¹ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gerakan dan Pemikiran*, (Jakarta: LSAF, 1985), hlm. 58.
- ²² *Ibid.*, hlm. 12.
- ²³ M. Amin Abdullah, *Study Agama, Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 106
- ²⁴ M. Amin Abdullah, “Pengantar”, dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhaw, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. iii-iv
- ²⁵ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 55-56.
- ²⁶ Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), hlm. 2-6
- ²⁷ *Politics of recognition* dikemukakan oleh Charles Taylor pada 1992 di depan kuliah terbuka di Princeton University. Mulanya gagasannya adalah gagasan politik yang kemudian berkembang di kajian lain, filsafat, sosiologi, budaya dan lainnya. Gagasannya dipengaruhi oleh padangan Jean-Jacques Rousseau dalam *Discourse Inequality* dan kesamaan martabat (*equal dignity of human rights*) yang dicetuskan Immanuel Kant. Gagasan Taylor bersumber pada *pertama*, bahwa sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama. *Kedua*, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan hal yang *ketiga*, yaitu pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua element sosial-budaya, termasuk juga negara. Charles Taylor. “The Politics of Recognition” dalam Amy Gutman. *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994), hlm. 18.
- ²⁸ *Ibid.*, hlm. 3-4.
- ²⁹ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 83
- ³⁰ Gregory Jay. “Critical Contexts For Multiculturalism” dalam <http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/conte xtsmulticult.htm>, download 2 Desember 2005

-
- ³¹ Kymlica W.. *Multicultural, Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 85
- ³² Steve Fuller, "Social Epistemology as a Critical Philosophy of Multiculturalism" dalam Ram Mahalingan dan Cameron McCarthy, *Multiculturalism Curriculum*, 2002. hlm. 15-36 sebagaimana dikutip oleh H.A.R. Tilaar, *op. cit*, hlm. 84-85.
- ³³ Raz J.. *The Morality of Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1986), hlm. 375.
- ³⁴ Bikhu Parekh. "What is Multiculturalism?" dalam *Jurnal India Seminar*, Desember 1999. Raz J.. *Ethics in Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics* (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 177.
- ³⁵ *Ibid.*
- ³⁶ Husni Thooyar, "Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kompetensi Multikultural" dalam *Makalah AICIS tahun 2014 di Balikpapan*.
- ³⁷ Statistik deskriptif yang meliputi rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan selisih skor minimum-maksimum (*range*) kompetensi multikultural untuk masing-masing kelompok ditampilkan pada Tabel 1. Besarnya rata-rata skor untuk seluruh kelompok dosen, menunjukkan tingginya kompetensi multikultural mereka.
- ³⁸ Wawancara dengan 5 orang dosen UIN Jakarta pada tanggal 27 – 28 Oktober 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghafur, *Jejak radikalisme pemahaman agama di perguruan tinggi*. (Ciputat: Cendekia Press, 2014).
- A. Syafii Maarif, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- A. Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Mizan 1993)
- Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta : Pilar Media, 2005)
- Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multi Religius* (Jakarta: PSAP, 2005)
- Amirulloh Syarbini, *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Bandung: Quanta, 2011)
- Amril, dkk, *Epitemolgi Integratif Keilmuan di Perguruan Tinggi Agama Islam*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014)
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 2000)
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
- Chen, C. "The Religious Varieties of Ethnic Presence: A Comparison Between a Taiwanese Immigrant Buddhist Temple and an Evangelical Christian Church", dalam *Jurnal Sociology of Religion*, Vol. 63 (2), 2000
- Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Edi Suharto, "Konflik Etnik dan Naluri Nativistik: Potensi dan Hambatan Pengembangan Masyarakat Multikultural", Makalah tidak diterbitkan
- Harun Nasution, *Islam Rasional, Gerakan dan Pemikiran*, (Jakarta: LSAF, 1985)

-
- Hurh, W. M. and K. C. Kim. "Religious Participation of Korean Immigrants in the United States" dalam *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 2, 1990
- Islam Berwawasan Deradikalisasi Pemahaman Agama" dalam *Jurnal PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan* - Vol. 30 No. 2 Oktober 2016.
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- M. Amin Abdullah, *Study Agama, Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- M. Amin Abdullah, "Pengantar", dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)
- M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000)
- M.A. Rana, 'Swat de-radicalization model: prospects for rehabilitating militants'. *Conflict and Peace Studies*, Volume 4, (2.) 2011
- Mahkamah Konstitusi, *Membangun Demokrasi Substantif, Meneguhkan Integritas Institusi: Laporan Tahunan 2010* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 51
- Mark Dechesne, *Deradicalization: Not soft, but strategic*. (Leiden: The Hague Center for Terrorism and Counterterrorism (CTC) - University of Leiden, 2012)
- Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn* (Singapore: ISEAS, 2013)
- Mengenai sejarah perjalanan UUPT ini, lihat misalnya Djoko Luknanto, "UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi" (<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU12-2012/> diakses pada 25 Mei 2013).
- Mulyanto, "Pemetaan Penelitian Berbasis Integrasi-interkoneksi" dalam *Kaunia*, Vol. in, No. 2, Oktober 2007.
- Muqowim, "Dinamika Kajian Islam "Madzhab Sapien" Pemetaan Atas Karya Disertasi di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," dalam
- Nasruddin Umar, *Deradikalisasi pemahaman Al-Qur'an dan hadits*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).
- Ngainun Naim dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2008)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000)

-
- Nurlena Rifai, dkk., "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: *Evaluasi Penerapan Integrasi keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran* " dalam *TARBIYA / Vol. I, No.1, Juni 2014*
- Oman Fathurrohman.dkk, *Sinergitas Penelitian bagi Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat: Analisis terhadap hasil Penelitian di UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian Kelompok pada Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI, "Kerangka Acuan", hlm. 4-5
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006
- Peter Mandaville et al., *Transnational Islam in South and Southeast Asia: Movements, Networks, and Conflict Dynamics* (Washington: The National Bureau of Asian Research, 2005)
- Reni Marlinawati, "Jauh Panggang dari Api: Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi" (<http://fppp.or.id/web/berita/1020#.UUSxNDqxlYw> diakses pada 24 Mei 2013). Tulisan ini diposting sejak Senin, 6 Februari 2012.
- Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)
- RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja 04 April 2012, pasal 10 ayat (2).
- RUU Pendidikan Tinggi Hasil Panja RUU DIKTI 22 Februari 2012 Untuk Bahan Uji Publik, pasal 11 ayat (2).
- Salfen Hasri, dkk, *Integrasi Sains dan Islam dan Implementasinya dalam Pembelajaran; Studi Kasus di Kulliyah of Education International Islamic University*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014)
- Susanto, "Bahan Belajar Mandiri Sebagai Suatu Model Modul Studi
- Syarifuddin Jurdi, dalam seminar "Radikalisme Kawan Kita". <http://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/398/page/fakultas> diakses hari Senin 27 Maret 2017. Nah, pasca peralihan IAIN ke UIN, program-program studi Umum
- Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
- The Wahid Institute, *Prolog Ilusi Negara Islam*, KH. Abdurrahman Wahid (Ed), (Jakarta: The Wahid Institute, 2009)
- Toto Suharto, "Tren Baru Studi Islam di Indonesia: Menuju Teo-antroposentrisme" dalam Toto Suharto dan Nor Huda (eds.), *Arah Baru Studi Islam di Indonesia: Teori dan Metodologi* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat (2).
- Willy Kimlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2003)